



Nomor : 128/DJU.1/KP3.4.3/1/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tanda Tangan
Perjanjian Kinerja tahun 2025

Jakarta, 16 Januari 2025

Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI
di Jakarta

Dengan Hormat,

Bersama surat ini, Kami mengajukan Permohonan tanda tangan Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum


Kurnia Arry Soelaksono



**Perjanjian Kinerja Tahunan
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Tahunan adalah komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangnya disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025 yang telah ditetapkan sebelumnya. Target pada setiap indikator ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum maka ditetapkan Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yaitu :

“Terwujudnya Badan Peradilan Umum Yang Agung”

Dengan Misi :

1. Menjaga Kemandirian Aparatur Peradilan Umum;
2. Meningkatkan Pembinaan Manajemen Peradilan Umum;
3. Meningkatkan Kualitas Aparatur Peradilan Umum;
4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Peradilan Umum.

Target dan capaian yang akan dicapai pada tahun 2025 tertuang dalam lampiran Perjanjian Kinerja Tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Tahun 2025.

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum..... | 3 |
| Lampiran 1 | |
| Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | 7 |
| Lampiran 2 | |
| Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 9 |
| Lampiran 3 | |
| Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum | 12 |

PERJANJIAN KINERJA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (jumlah) |
|----|--|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum | a. Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara Secara Sederhana, Tepat Waktu, Transparan dan Akuntabel | 130.971 Perkara |
| | | b. Jumlah Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Umum | 1 Naskah |
| 2. | Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum | a. Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung | 2% |
| | | b. Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung | 1 Laporan |
| 3. | Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum | a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum | 44.739 Orang |
| | | b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum | 1.000 Perkara |
| | | c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum | 6.679 Perkara |

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (jumlah) |
|----|--|--|-----------------|
| | | d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum | 1 Laporan |
| 4. | Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | 240 Orang |
| 5. | Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di lingkungan peradilan umum | Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum | 1 Laporan |
| 6. | Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum | a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | 4 Layanan |
| | | b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | 88 Unit |
| | | c. Jumlah SDM yang mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 400 Orang |
| | | d. Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum | 130 Orang |

| Kegiatan | Anggaran | |
|--|------------|------------------------|
| | Rp. | |
| 005.03 Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp. | 140.120.478.000 |
| 1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah) | Rp. | 84.979.693.000 |
| 1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum | Rp. | 1.226.675.000 |
| 6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum | Rp. | 44.765.454.000 |
| 6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum | Rp. | 5.914.036.000 |
| 6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum | Rp. | 3.234.620.000 |

Jakarta, 2 Januari 2025

Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia



Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Sugiyanto

Jabatan : Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025


Sekretaris Mahkamah Agung
Republik Indonesia

Sugiyanto

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kurnia Arry Soelaksono

Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

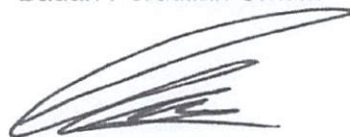
Jakarta, 2 Januari 2025



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum


Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum


Kurnia Arry Soelaksono

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
TAHUN 2025**

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (jumlah) |
|-----------|--|--|------------------------|
| 1. | Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum | a. Jumlah layanan dukungan internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | 4 Layanan |
| | | b. Jumlah Pemenuhan Sarana dan Prasarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum | 88 Unit |

| Kegiatan | Anggaran | |
|--|-----------------|----------------|
| 6243. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Umum (Badilum) | Rp | 44.765.454.000 |
| 6243.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal | Rp. | 40.086.509.000 |
| 6243.EBB. Layanan Sarana dan Prasarana Internal | Rp. | 1.040.760.000 |
| 6243.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal | Rp. | 1.131.117.000 |
| 6243.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal | Rp | 2.507.068.000 |

Jakarta, 2 Januari 2025



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Sekretaris Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum

Kurnia Arry Soelaksono



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasanudin

Jabatan : Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

Hasanudin

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DIREKTUR PEMBINAAN TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM
TAHUN 2025

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (jumlah) |
|-----------|--|--|------------------------|
| 1. | Terselenggaranya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum | Persentase Perkara Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif di Mahkamah Agung | 2% |
| | | Jumlah laporan perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Mahkamah Agung | 1 Laporan |
| 2. | Terselenggaranya Pembinaan Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | Jumlah Tenaga Teknis yang Mendapatkan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum | 240 Orang |
| 3. | Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum | Jumlah SDM Yang Mendapatkan Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | 400 Orang |

| Kegiatan | Anggaran | |
|---|------------|----------------------|
| | Rp. | |
| 1046. Pengembangan Tenaga Teknis Peradilan Umum | Rp. | 1.226.675.000 |
| 1046.AUC. Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara | Rp. | 1.226.675.000 |
| 6627. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Umum. | Rp. | 5.914.036.000 |
| 6627.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal | Rp. | 1.447.306.000 |
| 6627.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal | Rp. | 4.406.442.000 |
| 6627.EBD. Layanan Manajemen Kinerja Internal | Rp. | 60.288.000 |

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Tenaga Teknis
Peradilan Umum

A blue ink signature is written in a cursive style.

Hasanudin



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zahlisa Vitalita

Jabatan : Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Bambang Myanto

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2025



Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum

Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum

Zahlisa Vitalita

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN
DIREKTUR PEMBINAAN ADMINISTRASI PERADILAN UMUM
TAHUN 2025

| NO | SASARAN PROGRAM/KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET (jumlah) |
|-----------|--|---|------------------------|
| 1. | Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara Peradilan Umum | a. Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | 130.971 Perkara |
| | | b. Jumlah Naskah Tata Kelola di lingkungan Peradilan Umum | 1 Naskah |
| 2. | Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Umum | a. Jumlah Pengguna Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum | 44.739 Orang |
| | | b. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Umum | 1.000 Perkara |
| | | c. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum | 6.679 Perkara |
| | | d. Jumlah Laporan layanan hukum di Lingkungan Peradilan Umum | 1 Laporan |
| 3. | Terselenggaranya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum | Jumlah laporan putusan yang ditindaklanjuti (ekskusi) di Lingkungan Peradilan Umum | 1 Laporan |
| 4. | Terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Umum | Jumlah Tenaga Teknis yang mendapatkan Pembinaan Administrasi Peradilan Umum | 130 Orang |

| Kegiatan | Anggaran | |
|---|------------|-----------------------|
| | Rp | |
| 1049. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. (Daerah) | Rp | 84.979.693.000 |
| 1049.AEA. Koordinasi | Rp. | 7.498.631.000 |
| 1049.AEF. Sosialisasi dan Diseminasi | Rp. | 2.436.117.000 |
| 1049.BCA. Perkara Hukum Perseorangan | Rp. | 53.396.145.000 |
| 1049.QBA. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | Rp. | 13.136.800.000 |
| 1049.QCA. Perkara Hukum Perseorangan | Rp. | 8.512.000.000 |
| 6630. Dukungan Manajemen Administrasi Peradilan Umum | Rp. | 3.234.620.000 |
| 6630.EBA. Layanan Dukungan Manajemen Internal | Rp. | 2.182.600.000 |
| 6630.EBC. Layanan Manajemen SDM Internal | Rp | 1.052.020.000 |

Jakarta, 2 Januari 2025

Direktur Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

Direktur Pembinaan Administrasi
Peradilan Umum



Zahlisa Vitalita